

2025



Nomor : 22.13/RIS/VI/2025



RISALAH RAPAT PARIPURNA

Selasa, 24 Juni 2025

- Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 14.00 WIB
Waktu Selesai Rapat : 14.35 WIB

Pimpinan Rapat :
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. -
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

Peserta :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Wali Kota Yogyakarta.
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta.
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Pembawa Acara

Hadirin yang kami hormati.

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wali Kota Yogyakarta dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- Hadirin dimohon berdiri.

----- **MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA** -----

- Pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat.

----- **PEMBACAAN TEKS PANCASILA** -----

Hadirin disilakan duduk kembali.

RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

HARI SELASA, TANGGAL 24, BULAN JUNI, TAHUN 2025

DENGAN ACARA :

- **Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;**

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pembawa acara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/ibu hadirin sekalian dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Plt. Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 29 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan.

Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini, Selasa, 24 Juni 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Agenda rapat paripurna pada hari ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Raperda Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna Hari Senin tanggal 23 Juni 2025 kemarin.



Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap raperda tersebut.

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Menugaskan kepada Saudara Ipung Purwandari, S.H. Urutan ke- 1
2. Fraksi Partai Gerindra
Menugaskan kepada Saudara Krisnadi Setyawan Urutan ke- 2
3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Menugaskan kepada Saudara Muadz A.A., S.E., M.M. Urutan ke- 3
4. Fraksi Partai Golkar
Menugaskan kepada Saudara Bambang Seno Baskara, S.T. Urutan ke- 4
5. Fraksi Partai Amanat Nasional
Menugaskan kepada Saudara Tri Waluko Widodo, A.Md. Urutan ke- 5
6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Menugaskan kepada Saudara Taufik Setiawan, S.Sn. Urutan ke- 6
7. Fraksi Nasdem
Menugaskan kepada Saudara Oleg Yohan Urutan ke- 7

Terimakasih disampaikan kepada masing-masing Pimpinan Fraksi yang telah menyampaikan juru bicaranya.

Untuk kesempatan pertama sesuai urutannya, saya persilahkan kepada Saudara Ipung Purwandari, S.H. Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Ipung Purwandari, S.H. yang telah membacakan Pemandangan Umum Fraksinya.

Berikutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra. Kepada Saudara Krisnadi Setyawan, disilakan

----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Krisnadi Setyawan, yang telah menyerahkan Pemandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kepada Saudara Muadz A.A., S.E., M.M. , disilakan

----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Muadz A.A., S.E., M.M. , yang telah menyerahkan Pemandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan terakhir adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar, kepada Saudara Munazar, M.Psi. disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Golkar -----



Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Munazar, M.Psi. yang telah menyerahkan Pemandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional. Kepada Saudara Tri Waluko Widodo, A.Md. disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Amanat Nasional -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Tri Waluko Widodo, A.Md. yang telah menyerahkan Pemandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan terakhir adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kepada Saudara Taufik Setiawan, S.Sn. disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Taufik Setiawan, S.Sn. yang telah menyerahkan Pemandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Nasdem. Kepada Saudara Oleg Yohan disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Nasdem -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Oleg Yohan, yang telah membacakan Pemandangan Umum Fraksinya.

Demikian tadi telah kita simak bersama Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas raperda tersebut.

Selanjutnya materi tersebut akan menjadi bahan Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap raperda tersebut untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Juni 2025 pukul 13.00 WIB.

Untuk itu, kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta dimohon mempersiapkannya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

• Ketok Palu (XXX).

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.



PEMBAWA ACARA :

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI -----


Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan pada Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


KETUA,
FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.

Pit. SEKRETARIS,

ANTONIUS BAMBANG AGUNG A., S.I.P.
NIP. 197106301996031003





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

**NOTULEN RAPAT PARIPURNA
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

Hari/ Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 14.00 WIB
Waktu Selesai Rapat : 14.35 WIB

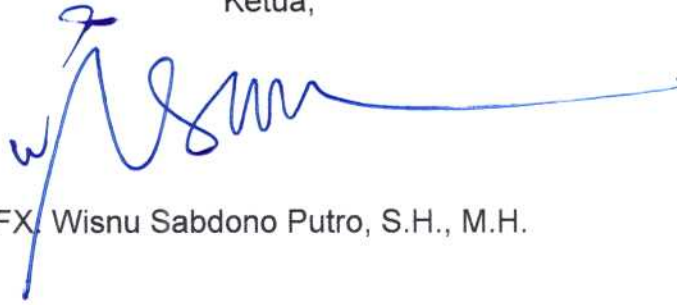
Pimpinan Rapat :
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. -
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

Peserta :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Wali Kota Yogyakarta.
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta.
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Hasil Rapat :
1. Rapat dipimpin oleh FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. (Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 29 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan dibacakan Saudara Ipung Purwandari, S.H. dengan nomor urut ke - 1
3. Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra diserahkan Saudara Krisnadi Setyawan dengan nomor urut ke - 2
4. Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera diserahkan Saudara Muadz A.A., S.E., M.M. dengan nomor urut ke - 3
5. Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar diserahkan Saudara Munazar, M.Psi. dengan nomor urut ke - 4.
6. Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional diserahkan Saudara Tri Waluko Widodo, A.Md. dengan nomor urut ke - 5
7. Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan diserahkan Saudara Taufik Setiawan, S.Sn.dengan nomor urut ke - 6

8. Pemandangan Umum Fraksi Partai Nasdem dibacakan. Saudara Oleg Yohan dengan nomor urut ke - 7
9. Selanjutnya materi dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas raperda tersebut akan menjadi bahan Jawaban Wali Kota Yogyakarta, untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Juni 2025 pukul 13.00 WIB. Wali Kota Yogyakarta dimohon untuk mempersiapkan.

Ketua,



FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Nomor : 000.1.5/907
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. WALI KOTA YOGYAKARTA

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PDH (Pakaian Dinas Harian Batik Lengan Panjang)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Nomor : 000.1.5/907
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Anggota DPRD Kota Yogyakarta

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABBONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Nomor : 000.1.5/907
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr.
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.

Paraf Hirarki		
Pejabat	Paraf	Tanggal
Plt. Sekretaris DPRD		
Kepala Bagian Persidangan, Per UU		
Ketua Tim Kerja		



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Nomor : 000.1.5/907
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr. Komandan Kodim Yogyakarta

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SAEDONO PUTRO, S.H., M.H.




SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Nomor : 000.1.5/907
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Kapolresta Kota Yogyakarta
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Nomor : 000.1.5/907
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Ketua Pengadilan Negeri

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.


KETUA
FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Nomor : 000.1.5/907
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Kepala Kejaksaan Negeri

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU S. ABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦶꦗꦏꦠꦫꦠ꧀ ꦱꦼꦏꦼꦠꦼꦂꦶꦠꦢꦫꦫꦢ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
 Tanggal : 24 Juni 2025
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
 Acara : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

EKSEKKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Anan		Sekretariat daerah	1.	
2.	Prananto		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.	
3.	Kachri R.		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	3.	
4.	Degi Rudianto		Asisten Administrasi Umum	4.	
5.			Staf Ahli Bid. Pemerintahan dan Kesejahteraan	5.	
6.	Henry		Staf Ahli Bid. Perekonomian dan Pembangunan	6.	
7.	Danang F		Staf Ahli Bid. Administrasi Umum	7.	
8.			Sekretariat DPRD	8.	
9.	Subayana		Bagian Tata Pemerintahan	9.	
10.			Bagian Hukum	10.	
11.	Hilwa Basuki		Bagian Kesejahteraan Rakyat	11.	
12.	Rahmat		Bagian Administrasi Pembangunan	12.	
13.	Bayu		Bagian Perekonomian dan Kerjasama	13.	
14.	Edad		Bagian Umum dan Protokol	14.	
15.	Pradhana		Bagian Organisasi	15.	
16.	Surya		Bagian Administrasi dan Keuangan	16.	
17.	Murliawan		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	17.	

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

TERHADAP

**RANCANGAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

TAHUN ANGGARAN 2025



PDI PERJUANGAN

Paripurna, Juni 2025

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua

Om Swastiastu

Salam Kebajikan

Rahayu

Merdeka !!!

Yang terhormat Sidang Paripurna Dewan,

Yang kami hormati Pimpinan Sidang Paripurna Dewan dan

Yang kami hormati Saudara-Saudara Anggota Dewan,

Yang kami hormati Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Yogyakarta

Yang saya hormati Saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta

Yang saya hormati, Saudara Seketaris Daerah, Asisten, Staff Ahli dan Kepala Perangkat Pemerintah Kota Yogyakarta

Yang saya hormati, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Puji syukur marilah kita panjatkan kepada *Allah Subhana Wata'ala* atas segala limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga kita pada kesempatan hari ini dapat bertemu pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kekurangan suatu apapun.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap :

RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

Saudara Pimpinan dan Rapat Pimpinan Dewan yang terhormat,

Setelah melakukan pencermatan terhadap **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025**, Fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan serta masukan, sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat 5 (lima) alasan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam Perubahan APBD, yaitu :
 - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD

- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja
 - 3) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan
 - 4) Keadaan darurat
 - 5) Keadaan luas biasa
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perangkat kebijakan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. APBD juga menjadi sarana bagi pemangku kepentingan tertentu untuk melihat dan mengetahui kemampuan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. Dari sisi pendapatan daerah, perkembangan APBD dapat dijadikan dasar perencanaan jangka pendek. Selisih lebih atau kurang antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja mengakibatkan surplus atau defisit APBD.
3. Dalam penyusunan APBD, jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) semestinya sama dengan nol, yang artinya penerimaan pembiayaan harus mampu menutupi terjadinya defisit anggaran. Nilai positif untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berarti terdapat pembiayaan bersih setelah dikurangi defisit anggaran masih tersisa, artinya masih adanya dana anggaran dari penerimaan pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk membiayai belanja daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan daerah.
4. Rasio SiLPA terhadap belanja selain menggambarkan besaran belanja yang tertunda pelaksanaannya pada tahun sebelumnya juga menggambarkan jumlah realisasi pendapatan tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari proyeksinya
5. Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 hendaknya mengacu pada pedoman perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas platform yang selaras dengan visi pembangunan Kota Yogyakarta yang mencerminkan cita-cita, harapan

dan amanat masyarakat Kota Yogyakarta dalam pembangunan Kota Yogyakarta.

Kami berharap SiLPA pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini akan memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kepeninginan rakyat dan pembangunan bagi Kota Yogyakarta.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati

Demikian tanggapan dan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang dapat kami sampaikan.

Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kami mengucapkan banyak terima kasih, serta apabila ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Sekian, Wa'billahi taufiq Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarrokathu.

Salam Sejahtera untuk kita semua

Om Swastiastu

Salam Kebajikan

Rahayu

Yogyakarta, Juni 2025

**Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta**

Ketua

Darini, S.IP



Sekretaris

Ipung Purwandari, SH



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA

Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Kota

Yogyakarta Hari / Tanggal: Selasa, 24 Juni 2025

Atas

Penyampaian

1. RAPERDA perubahan APBD Kota Yogyakarta TA 2025

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Yang Terhormat

Sdr. Pimpinan Sidang

Yang Kami Hormati

Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta

Sdr. Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta

Yang Kami Hormati

Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ;

Saudara-saudara Anggota Forkopimda Kota Yogyakarta

Rekan-rekan anggota DPRD Kota Yogyakarta

Rekan-rekan Wartawan dan Hadirin Sekalian yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan pula kepada seluruh anggota



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

DPRD Kota Yogyakarta yang dapat hadir pada Rapat Paripurna kali ini.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Melalui analisis dan telaah Fraksi Gerindra terhadap rencana APBD Kota Yogyakarta TA 2025, Fraksi Gerindra berpandangan bahwa:

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta harus direalisasikan dengan tepat sasaran. Berdasarkan visi misi, program prioritas dan permasalahan utama semestinya harus dilaksanakan secara relevan. Permasalahan utama Kota Yogyakarta seperti Ketimpangan, Kemiskinan, angka pengangguran dan ruang terbuka hijau harus diatasi dengan program-program yang konkret. Fraksi Gerindra menegaskan bahwa tanpa keselarasan yang nyata antara visi-misi pembangunan dan prioritas anggaran, maka upaya mewujudkan kota yang adil makmur, lestari, dan berkeadilan akan sulit tercapai. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta harus berani mengubah pendekatan pembangunan: dari pembangunan simbolik menjadi pembangunan yang berpihak dan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat.

Target pendapatan daerah pada rancangan APBD TA 2025 diketahui mengalami penurunan sebesar Rp 108.539.633.879. Penurunan pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah yang ditargetkan mengalami penurunan sebesar Rp 62.530.797.495,- dan pendapatan transfer juga mengalami penurunan Rp 46.008.836.375. Disisi lain rencana belanja pegawai mengalami peningkatan, rencana belanja pegawai TA 2025 yakni sebesar Rp 853.243.560.775,- Hal tersebut semestinya dapat dijelaskan secara komprehensif, karena menurunnya pendapatan daerah Kota Yogyakarta tidak sejalan dengan naiknya belanja pegawai. Selain itu, berdasarkan dokumen KUA PPS juga diketahui bahwa peningkatan anggaran belanja pegawai tahun 2025 sebesar Rp 23.321.197.553 (2,81%) atau 39,71 % dari total anggaran belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp 2.148.161.217.103,01. Jika pendapatan daerah ditargetkan turun mengapa belanja pegawai semakin naik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) pasal 146 ayat 1 dan 2 berbunyi, pasal 146 ayat 1 "*Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.*



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

” Dan bunyi pasal 2 “*Dalam hal persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan*”.

Berdasarkan dokumen KUA PPAS dan pengantar nota keuangann rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Yogyakarta terdapat perbedaan jumlah pendapatan, yakni sejumlah Rp 1.619.687.000. Pendapatan yang tertera pada dokumen KUA PPS sebesar Rp 1.991.543.294.370 lebih rendah ketimbang pengantar nota keuangann rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Yogyakarta yang berjumlah Rp 1.993.162.981.370. Hal serupa juga terdapat pada rencana bealanja anggaran yang memiliki perbedaan yakni sebesar Rp 1.619.687.000,- sehingga hal tersebut perlu dijelaskan. Secara detail beberapa perbedaan anggaran tersebut antara lain:

URAIAN	SEBELUM (KUA PPS)	SEBELUM (NOTA KEUANGAN)	PERBEDAAN / SELISIH	SETELAH (KUA PPS)	SETELAH (NOTA KEUANGAN)	PERBEDAAN / SELISIH
PENDAPATAN DAERAH	2.101.702.615.240	2.101.702.615.240	-	1.991.543.294.370	1.993.162.981.370	1.619.687.000
BELANJA DAERAH	2.180.516.463.311	2.180.516.463.311	-	2.148.161.217.103,01	2.149.780.904.130,01	1.619.687.027
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	122.857.180.071	122.857.180.071	-	200.661.254.733,01	200.661.254.733,01	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	44.043.332.000	44.043.332.000	-	44.043.332.000	44.043.332.000	-

URAIAN	SEBELUM (KUA PPS)	SEBELUM (NOTA KEUANGAN)	PERBEDAAN / SELISIH	SETELAH (KUA PPS)	SETELAH (NOTA KEUANGAN)	PERBEDAAN / SELISIH
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.000.166.831.321	1.000.166.831.321	-	936.080.186.826	937.636.033.826,00	1.555.847.000



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

PENDAPATAN TRANSFER	1.101.535.783.919	1.101.535.783.919	-	1.055.463.107.544	1.055.526.947.544,00	63.840.000
LAIN-LAIN PD YANG SAH	-			-		
PENDAPATAN DAERAH	2.101.702.615.240	2.101.702.615.240	-	1.991.543.294.370	1.993.162.981.370,00	1.619.687.000

URAIAN	SEBELUM (KUA PPS)	SEBELUM (NOTA KEUANGAN)	PERBEDAAN / SELISIH	SETELAH (KUA PPS)	SETELAH (NOTA KEUANGAN)	PERBEDAAN / SELISIH
BELANJA OPERASI	1.847.654.404.531,00	1.847.654.404.531,00	-	1.915.113.353.197,00	1.916.801.667.288,00	1.688.314.091
Belanja Pegawai	829.690.333.179,00	829.690.333.179,00	-	853.011.530.732,00	853.243.560.775,00	232.030.043
Belanja Barang dan Jasa	909.016.230.947,00	909.016.230.947,00	-	932.156.179.474,00	934.281.825.877,00	2.125.646.403
Belanja Hibah	97.725.590.405,00	97.725.590.405,00	-	105.916.592.991,00	105.247.230.636,00	669.362.355
Belanja Bantuan Sosial	11.222.250.000,00	11.222.250.000,00	-	24.029.050.000,00	24.029.050.000,00	-
BELANJA MODAL	230.084.593.387,00	230.084.593.387,00	-	208.710.886.445,00	211.427.030.483,00	2.716.144.038
BELANJA TIDAK TERDUGA	101.524.276.013,00	101.524.276.013,00	-	23.083.788.081,01	20.299.016.952,01	2.784.771.129
BELANJA TRANSFER	1.253.189.380,00	1.253.189.380,00	-	1.253.189.380,00	1.253.189.380,00	-



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

BELANJA DAERAH	2.180.516.463.311,00	2.180.516.463.311,00	-	2.148.161.217.103,01	2.149.780.904.103,01	1.619.687.000
----------------	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	---------------

Demikian Pandangan Umum kami Fraksi Gerindra, kiranya kita bersama-sama bisa bekerja bahu-membahu untuk Kota Yogyakarta yang kita cintai demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Demikian, jika ada kata kurang berkenan dari beberapa hal yang kami haturkan, mohon dimaafkan.

Saudara Pimpinan dan Rapat Dewan beserta Walikota atau Wakil Walikota yang terhormat, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Sekian,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 24 Juni 2025
Hormat Kami,

Ketua

Dhian Novitasari, S.Pd



Sekretaris

Ririk Banowati Permanasari, SH

Pemandangan Umum
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
Tentang
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna

Yang kami hormati Saudara Walikota Yogyakarta,

Yang kami hormati Rekan-Rekan Anggota DPRD Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta

Yang kami hormati Segenap Jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Para Undangan, serta Rekan-Rekan Jurnalis,

Segala puji bagi Allah Robbul 'Alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang tetap istiqomah hingga hari akhir zaman.

Perkenankan pada kesempatan ini kami sampaikan terimakasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami selaku Juru Bicara Fraksi untuk menyampaikan **Pemandangan Umum tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.**

Sidang Paripurna yang berbahagia,

Mengingat tahun 2025 adalah tahun optimisme dimana banyak indikator positif bisa kita lihat dari angka kemiskinan yang mulai berkurang signifikan maupun indeks pembangunan manusia yang masuk dalam kategori sangat tinggi, Pertama, berdasarkan data BPS tingkat

kemiskinan di Kota Yogyakarta ada di angka 6,26% atau turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,49%, Selanjutnya angka Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta yang mencapai 89,1% dimana angka ini berbanding lurus dengan angka harapan lama sekolah yang mencapai 17,66 tahun dan juga angka partisipasi sekolah yang sudah stabil, Pencapaian tersebut tentu sejalan dengan tema pembangunan tahun 2025 dimana pembangunan diwujudkan dengan tiga kata kunci yaitu adil Makmur, Lestari dan berkeadaban. Tiga kata kunci tersebut termanifestasi pada pembangunan yang fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah dan bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

Ikhtiar untuk menggerakkan perekonomian berbasis kerakyatan dan potensi daerah yang mampu memberikan dampak terhadap perluasan lapangan kerja dan mengentaskan kesmiskinan tentu membutuhkan upaya kerjasama dan saling mendukung antar semua elemen masyarakat untuk membangun pondasi perekonomian yang lebih baik agar kemudian Kota Yogyakarta memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap kontraksi ekonomi, Selain kesiapan pondasi ekonomi dan masyarakat tentu juga dibutuhkan pola kepemimpinan yang mampu menavigasi Kota Yogyakarta untuk melewati potensi krisis multidimensi yang terjadi.

Perubahan APBD Kota Yogyakarta 2025 ini, Selain untuk melihat sejauh mana keseriusan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyiapkan pembangunan ekonomi yang berbasis potensi daerah juga harus dapat mengevaluasi ketercapaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta secara umum, sehingga kebijakan anggaran terhadap Perubahan APBD Kota Yogyakarta 2025 dapat sesuai dengan tema pembangunan yaitu : *“Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta”*.

Fraksi PKS menilai Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan berbagai terobosan untuk membangun infrastruktur perekonomian yang kuat serta menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat diantaranya terkait permasalahan sampah dan juga pemerataan ekonomi, karena saat ini terobosan yang sudah ada terbilang belum dapat memberikan perbaikan terhadap permasalahan secara signifikan. Sehingga perubahan anggaran APBD 2025 ini harus memberi daya dukung anggaran yang memadai untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat dan juga tetap diupayakan untuk mencapai Tema Pembangunan yang telah dicanangkan bersama.

Sidang Paripurna yang berbahagia,

Prioritas Alokasi Anggaran Untuk Mendorong Penyelesaian Permasalahan di Kota Yogyakarta

Fraksi PKS mendesak perubahan anggaran APBD 2025 agar memprioritaskan tiga hal substansial, pertama terkait penanganan permasalahan sampah, dimana hal tersebut membutuhkan skala prioritas anggaran yang terukur, sistematis dan membutuhkan pelibatan masyarakat, sehingga dalam penganggaran tidak boleh hanya sebatas penyelesaian jangka pendek tapi juga jangka panjang.

Dalam proses penyelesaian permasalahan sampah jangka panjang literasi lingkungan masyarakat memiliki faktor penting dalam pengelolaan sampah, karena masyarakat yang memiliki tingkat pemahaman permasalahan lingkungan akan lebih memungkinkan untuk berpartisipasi dalam program zero sampah anorganik dan daur ulang, Sehingga berdasarkan studi tersebut kemudian Fraksi PKS mendorong dua hal dalam pengelolaan sampah di yaitu

1. Adanya prioritas anggaran untuk pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pendampingan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta.
2. Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kota dapat memprioritaskan alokasi anggaran dalam penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pemilahan sampah dari hulu di wilayah baik yang bersifat organik maupun anorganik, dimana sarana prasarana tersebut saat ini belum tercantum jelas dalam penganggaran padahal dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2013 hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Selain prioritas anggaran untuk penyelesaian permasalahan sampah, Fraksi PKS juga mendorong prioritas anggaran untuk penyelesaian permasalahan di Kota Yogyakarta,

1. Pemukiman padat penduduk harus mendapatkan perhatian serius Pemerintah Kota Yogyakarta. Karena masyarakat berhak untuk hidup layak, aman dan nyaman lalu Fraksi PKS Juga mendorong prioritas anggaran untuk menampilkan dan mewujudkan karakter khas Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan budaya, karena setelah kami pelajari hal tersebut belum tercermin dalam proses penganggaran.
2. Fraksi PKS mendorong pemerintah kota untuk fokus pada upaya penanggulangan kemiskinan dengan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, karena kondisi saat ini penduduk miskin di Kota Yogyakarta berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS tahun 2024 ada di angka 28,79

ribu jiwa sudah menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 29,48 ribu jiwa, Berdasarkan hal tersebut kemudian dibutuhkan upaya agar tahun ini angka kemiskinan dapat terus menurun salah satunya adalah dengan menggencarkan Program Ekonomi, dimana dalam kondisi saat ini yang dibutuhkan selain proteksi dengan memberikan bantuan adalah penguatan seperti memperkuat UMKM dan Koperasi agar mampu berkembang dengan memberikan berbagai sarana maupun pelatihan.

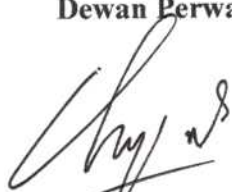
3. Fraksi PKS meminta pemerintah kota untuk melakukan penguatan anggaran kewilayahan, yaitu anggaran yang langsung bersentuhan dengan masyarakat baik melalui OPD maupun Kemantren.
4. Fraksi PKS mendorong pemerintah Kota Yogyakarta agar mulai mempersiapkan kampung-kampung yang ada untuk menjadi destinasi wisata budaya dengan mulai menata kampung-kampung untuk mengembangkan ciri khas budaya dan sejarah masing-masing seperti kampung prajurit, kampung basa jawa dan lainnya. Pengembangan destinasi wisata budaya harapannya dilakukan dengan dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sebagai penutup, kami mohon maaf bilamana dari penyampaian kami ada yang kurang berkenan di hati, apa yang kami sampaikan semata-mata kami maksudkan untuk kebaikan Kota Yogyakarta yang kita cintai. Terimakasih atas perhatian yang diberikan.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Fraksi Keadilan Sejahtera

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta


Cahyo Wibowo, S.T.
Ketua


Ejau Kurniawan, S.IP.
Sekretaris



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

TERHADAP

PENGANTAR NOTA KEUANGAN
DAN
NOTA KEUANGAN


TENTANG

RANCANGAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

Disusun Oleh:

Fraksi Partai Golongan Karya

dprd@jogja.go.id 

0274 540650 

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
PENGANTAR NOTA KEUANGAN DAN NOTA KEUANGAN
TENTANG
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025**

Disampaikan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juni 2025
Jam : 13.00 WIB
Juru Bicara : Muhammad Affan, S.IP., S.H

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;

Yang kami hormati Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan beserta seluruh Anggota Dewan;

Yang kami hormati segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Sekertaris Daerah beserta seluruh Jajaran Eksekutif;

Rekan-rekan Wartawan, para Tamu Undangan dan segenap hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga bisa menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini.

Selanjutnya kepada Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Pengantar Nota Keuangan dan Nota Keuangan tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

Kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Penjabat Walikota Yogyakarta, yang telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 pada paripurna yang lalu.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD disusun berdasarkan dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah maupun dokumen penganggaran yang meliputi Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Dokumen perencanaan dan penganggaran di atas dirancang dan disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom-up*). Rencana kerja tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang merupakan perwujudan upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Rencana kerja tersebut kemudian dituangkan dalam satuan moneter, dalam bentuk paling ringkas yaitu APBD yang menggambarkan kondisi keuangan berupa informasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

APBD merupakan salah satu alat ekonomi penting yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah dapat menggunakan APBD untuk mempengaruhi kondisi perekonomian daerah, terutama mendorong peran yang lebih besar pada swasta dan masyarakat dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah. APBD selain memiliki kemampuan memberikan peran sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, juga dapat berperan sebagai pengendali aktivitas perekonomian.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya serapan anggaran secara efektif yang didasarkan pada perencanaan berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang di asumsikan secara terukur selama kurun waktu 1 tahun.

Secara Yuridis Formal, Kebijakan Perubahan APBD 2025 ini mengacu pada Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Tematik pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2025 tak lepas dalam mendukung visi pembangunan Kota Yogyakarta yang mencakup tiga kata kunci sebagai cerminan cita-cita, harapan dan amanat masyarakat Kota Yogyakarta yaitu " Adil Makmur", " Lestari", dan " Berkeadaban ". Visi tersebut menjadi pemandu gerak bersama antara pemerintahan dan seluruh masyarakat Kota Yogyakarta yang terus tumbuh dan berkembang, tanpa meninggalkan nilai-nilai

budaya, etika, dan moral sebagai identitas khas kota yang berlandaskan kearifan local serta semangat kebersamaan.

Sebagai Kota Pendidikan berkualitas dengan penguatan kualitas sumber daya manusia dengan dukungan pelayanan jasa yang memadai untuk keberlanjutan pembangunan dalam segala bidang termasuk infrastruktur dan pariwisata sebagai penggerak ekonomi utama untuk kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada 5 (lima) alasan yang dapat digunakan sebagai dasar Perubahan APBD, yaitu (1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD; (2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; (4) keadaan darurat; dan/atau (5) keadaan luar biasa.

Tematik pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2025 ini tak lepas dalam mendukung visi pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu sebagai kota pendidikan berkualitas dengan penguatan kualitas sumber daya manusia dengan dukungan pelayanan jasa yang memadai untuk keberlanjutan pembangunan dalam segala bidang termasuk infrastruktur dan pariwisata sebagai penggerak ekonomi utama untuk kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,

Setelah mencermati Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 dari Penjelasan Saudara Penjabat Walikota, maka Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa:

1. Fraksi Partai Golkar berharap Pemerintah Kota Yogyakarta mendorong OPD untuk menuntaskan program-program kegiatannya di tengah pemulihan laju perekonomian Kota Yogyakarta dengan harapan adanya pemulihan sosial ekonomi di wilayah Kota Yogyakarta menjadi stimulus dalam upaya menggerakkan perekonomian dimasyarakat sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan mengentaskan kemiskinan. Disamping itu, dengan banyaknya jenis bansos yang diberikan kepada masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana kegiatan bansos agar ikut cek and ricek terhadap usulan masyarakat yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
2. Total APBD sebelum perubahan sejumlah Rp. 2.224.559.795.311,00 (*dua triliun dua ratus dua puluh empat miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah*) mengalami penurunan sebesar Rp.30.735.559.207,99 (*tiga puluh milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan puluh sembilan*) sehingga pada Perubahan APBD TA 2025 total APBD menjadi sejumlah Rp.2.193.824.236.103,01,- (*dua triliun seratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga rupiah satu*

sen). Sehingga dapat membantu masyarakat yang tertuang di dalam Rencana Kerja.

3. Proses Perubahan Anggaran diperlukan pencermatan kembali terhadap pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan daerah sehingga terdapat ruang untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk merespon dinamika eksternal dan internal yang terjadi sepanjang tahun berjalan serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
4. Fraksi Partai Golkar berharap dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 ini dapat memunculkan program-program yang dapat menunjang kehidupan warga Kota Yogyakarta dalam mengentaskan kemiskinan. Terutama untuk para pekerja sektor informal yang di PHK atau diistirahatkan, dapat menciptakan lapangan kerja baru, dan menjadi upaya menggerakkan perekonomian masyarakat terutama dalam bidang UMKM. Kami berharap program jaring pengaman sosial telah berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya.
5. Fraksi Partai Golkar berharap pengelolaan Anggaran lebih baik lagi kedepan dalam mendorong kesejahteraan rakyat serta Menyikapi beberapa *isue* terkait Pemerintahan, Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Rakyat serta infrastruktur, dan upaya dalam pemulihan ekonomi masyarakat terdampak *pandemic*.
6. Kami menyadari bahwa pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini memerlukan waktu dan perhatian khusus. Kami yakin, dilandasi semangat

merajut kebersamaan, membangun kesepahaman, dan menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab, kita senantiasa mampu bekerja secara kolaboratif serta berdiskusi secara konstruktif dalam upaya mewujudkan cita-cita bersama untuk Kota Yogyakarta yang lebih maju, berdaya saing, dan lebih berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

7. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah serta belum dilakukan secara profesional yang berorientasi pada pasar, hal ini terjadi karena beberapa kebijakan yang ditempuh masih mengedepankan fungsi fasilitasi dan pelayanan. Pengelolaan PAD yang belum optimal, efisien dan efektif. Kurangnya kepatuhan sebagian masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Informasi alokasi dana transfer dari Pemerintah bersifat dinamis. Beberapa obyek pendapatan yang bersumber dari transfer pusat ke daerah, sering mengalami perubahan alokasi sehingga tidak ada kepastian informasi mengenai dana transfer.
8. Perbaiki manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan penggunaan alat bantu berbasis teknologi sehingga prosedur dapat disederhanakan;
9. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan masukan.

Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara.

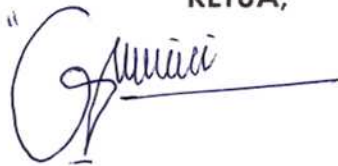
Dan mohon maaf jika ada hal- hal yang kurang berkenan,

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,

Wassallamualaikum wr, wb.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

KETUA,



R.Candra Akbar Ishmata, S.H

SEKRETARIS,



Yogo Prasetyo Pri Hutomo



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP RAPERDA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Disampaikan Pada Rapat Paripurna
DPRD Kota Yogyakarta

Hari / Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025

Jam : 13.00 WIB

Juru Bicara : Tri Waluko Widodo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang kami hormati Pimpinan Rapat Paripurna dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Saudara Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;

Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta

Yang kami hormati pula Sekretaris Daerah serta segenap jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta

Yang kami hormati Tamu undangan dan rekan-rekan wartawan yang berbahagia.

Puji syukur Kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal afiat.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (Fraksi PAN) untuk menyampaikan Pemandangan Umum Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 DPRD Kota Yogyakarta

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada saudara Walikota Yogyakarta yang telah menyampaikan Nota Keuangan pada rapat paripurna kemarin siang. Demikian juga ucapan terimakasih kami sampaikan pula kepada Panitia Anggaran, unit-unit kerja dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah melakukan klarifikasi dan pencermatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP).

Konsep dan Tujuan APBD Perubahan dalam Tata Kelola Keuangan Daerah APBD Perubahan adalah dokumen yang merinci revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah mengalami mekanisme perubahan APBD. Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan anggaran setelah perubahan disahkan. Perubahan APBD merupakan mekanisme yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah, memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan rencananya dengan dinamika yang tidak

terprediksi atau perubahan prioritas yang muncul setelah APBD awal ditetapkan.

Perubahan APBD merupakan sebuah hal yang dimungkinkan di tengah perjalanan pelaksanaan APBD. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, perubahan atas APBD dapat dilakukan apabila terjadi (1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, (4) keadaan darurat, dan (5) keadaan luar biasa dalam pengantar Saudara Walikota disampaikan bahwa perubahan APBD tahun 2025 ini disebabkan karena alasan pada butir 1, 2 dan 3. Perubahan APBD juga dilakukan untuk mengintegrasikan visi, misi, dan program Walikota terpilih yang baru menjabat, atau untuk menyelaraskan dengan program-program prioritas nasional seperti "Asta Cita." Ini memastikan bahwa rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan APBD tetap relevan dan responsif terhadap arah kebijakan yang baru.

F- PAN memberi catatan dalam APBD – P Tahun Anggaran 2025 yang harus menjadi perhatian sesuai dengan Pengantar Nota Keuangan yang dibacakan Saudara Walikota mengacu RPJMD serta prioritas pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2025 serta penjabarannya sebagai berikut :

A. Pembangunan Pendidikan mempertahankan Kota Pendidikan

1. **Permasalahan ijazah bagi pelajar SMA/SMK Negeri dan Swasta** warga Kota Yogyakarta yang lulus kelas XII namun ditahan pihak Sekolah karena tidak mampu membayar administrasi Sekolah ,perlu peningkatan plafon anggaran JPD serta terobosan teknis Sinergitas OPD terkait untuk menuntaskan PR ini, sehingga Warga Pelajar Kota Yogyakarta bisa melanjutkan ke Pelatihan maupun memasuki dunia kerja tanpa adanya permasalahan ijazah ini sebagai salah satu syarat utama lowongan kerja (penjabaran Pemantaban Kualitas SDM peningkatan pendidikan, penurunan angka kemiskinan) .
2. Siswa TK/PAUD, SD dan SMP Negeri maupun swasta perlu ada dukungan lebih dari BOSDA Kota Yogyakarta. Jika dahulu merupakan unggulan program bagi Warga Kota Yogyakarta, namun seiring putusan **MK yang menggratiskan pendidikan SD - SMP Negeri dan Swasta** perlu perumusan kembali terkait beban biaya pendidikan di Kota Yogyakarta maupun skema intervensi APBD, apakah APBD Perubahan 2025 sudah mengakomodasi putusan MK tersebut.
3. Meningkatkan insentif guru dan tenaga kependidikan di Lingkungan Sekolah Kota Yogyakarta secara proporsional.

4. F - PAN kembali mengingatkan terkait peremajaan guru-guru yang akan purna, karena dikhawatirkan ada kekurangan guru akibat belum adanya pengangkatan guru/P3K di Sekolah - sekolah negeri.

B. Pembangunan Kesehatan

1. Dengan adanya surat dari Kementrian sosial yang akan berlaku mulai bulan Juli 2025 terkait perubahan pelayanan dan kepersertaan BPJS yang tentu akan merubah konsep Universal Health Coverage (UHC) yang selama ini menjadi hak Warga Kota Yogyakarta apakah Pemerintah Kota Yogyakarta melalui OPD terkait sudah mempersiapkan skema teknis sehingga Warga Kota Yogyakarta yang tidak masuk kepersertaan DTKS/DTSEN tetap bisa menggunakan fasilitas kesehatan.
2. Perlu meningkatkan mutu pelayanan kepada Masyarakat, serta semakin menguatkan peran Puskesmas - puskesmas di setiap Kemantren didalam pembinaan kesehatan Masyarakat (Posyandu, Posbidum Lansia).
3. Selama ini biaya kegiatan Posbindum, Posyandu masih swadaya pengurus dan masyarakat sehingga perlu mengalokasikan bantuan dana khusus untuk kegiatan Posbindum Posyandu se-Kota Yogyakarta serta kedepan perlu dialokasikan dana utk insentif kader Posyandu.

C. Sektor Ekonomi dan Pariwisata

Fokus utama APBD 2025 Kota Yogyakarta pada "penguatan ekonomi kerakyatan" dengan tujuan eksplisit untuk

1. mendorong pertumbuhan ekonomi,
2. memperluas lapangan kerja, dan
3. menurunkan tingkat kemiskinan

Menunjukkan orientasi yang kuat terhadap pembangunan inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencerminkan kerangka kebijakan yang koheren, di mana alokasi keuangan secara langsung terikat pada tujuan sosio-ekonomi yang terukur. Pendekatan ini menunjukkan orientasi penganggaran berbasis kinerja, di mana efektivitas anggaran pada akhirnya akan dinilai berdasarkan dampaknya terhadap indikator-indikator kunci ini. APBD Perubahan harusnya berkomitmen pada "ekonomi kerakyatan," mendukung program-program seperti

1. Program Recovery Ekonomi Pariwisata dan UMKM melalui stimulus bantuan Perbankan.
2. Penguatan program – program Pemkot Yogyakarta yang terbukti efektif mengerakkan UMKM dan Warga Kota Yogyakarta
3. Pengembangan usaha mikro.
4. Revitalisasi pasar tradisional.
5. Pelatihan keterampilan,
6. Mendorong promosi dan fasilitasi Kampung – Kampung wisata (terbukti penghargaan Nasional serta pergerakan

ekonomi berbasis Pariwisata .maupun pembangunan infrastruktur sinergitas antar OPD).

Dinamika APBD Perubahan akan mengungkapkan seberapa kuat komitmen ini dipertahankan atau diadaptasi di tengah perubahan keadaan.

D. Pengelolaan Sampah

Terkait penanganan sampah F- PAN mencatat beberapa Kemajuan yang Dicapai pada Awal 2025:

- 1. Pengosongan TPS dan Transisi Depo:** Kemajuan signifikan dilaporkan pada awal 2025 dengan pengosongan sebagian besar Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kota Yogyakarta pada 7 April 2025. Kota ini secara aktif bertransisi ke sistem pengelolaan berbasis depo, dengan target jelas untuk penutupan TPS permanen pada akhir April dan 45 depo/TPS bersih pada pertengahan April. Hal ini menunjukkan eksekusi operasional jangka pendek yang efektif.
- 2. Peningkatan Posko Darurat:** Pendirian 27 posko darurat sampah secara proaktif menunjukkan responsivitas kota dalam memerangi pembuangan sampah liar dan mengelola titik-titik akumulasi sampah yang kritis.
- 3. Jaringan Transporter yang Kuat:** Jaringan 1.130 transporter yang melayani lebih dari 50.000 rumah tangga menunjukkan infrastruktur pengumpulan tingkat komunitas

yang mapan yang dapat dimanfaatkan untuk aliran sampah yang efisien.

4. **Pemanfaatan ITF Bawuran:** Pemeriksaan yang berhasil terhadap insenerator di ITF Bawuran di Bantul (dengan kapasitas 235 ton) mengkonfirmasi kesiapannya untuk menerima sampah sisa dari Kota Yogyakarta, menyediakan solusi pengolahan di luar lokasi yang krusial segera setelah krisis.

Komitmen APBD Perubahan Tahun 2025 Kota Yogyakarta terhadap penanganan sampah menunjukkan respons yang kuat dan terarah terhadap krisis lingkungan yang mendesak. Realokasi anggaran yang signifikan dari pos-pos non-esensial ke inisiatif pengelolaan sampah, seperti pengadaan gerobak sampah dan transisi sistem depo, secara jelas menggarisbawahi kemauan politik dan prioritas strategis pemerintah kota. Ini adalah langkah yang penting dan konkret dalam mengatasi masalah yang telah memuncak.

Meskipun demikian, analisis mendalam terhadap target Masterplan dan inisiatif yang didanai mengungkapkan adanya ketidakseimbangan strategis. Fokus yang sangat agresif pada penanganan sampah hilir, meskipun diperlukan dalam situasi darurat, berpotensi mengabaikan percepatan upaya pengurangan sampah di hulu. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan jangka panjang dan efisiensi biaya jika volume sampah terus meningkat tanpa pengurangan yang proporsional di sumbernya.

Selain itu, ketergantungan pada fasilitas pengolahan sampah regional di luar batas administrasi Kota Yogyakarta menyoroti kerentanan dan pentingnya kerja sama antar-daerah yang berkelanjutan. Solusi pengelolaan sampah yang komprehensif tidak dapat hanya bersifat internal tetapi harus melibatkan sinergi regional yang kuat.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang benar-benar berkelanjutan, Kota Yogyakarta perlu memperkuat investasi dan penegakan kebijakan yang mendorong perubahan perilaku masyarakat secara fundamental, seperti pemilahan sampah di sumber dan pengurangan plastik sekali pakai. Sinergi antara pengembangan infrastruktur dan perubahan perilaku adalah kunci. Dengan demikian, APBD Perubahan 2025 merupakan fondasi yang kuat untuk penanganan sampah, namun keberhasilan jangka panjang akan sangat bergantung pada kemampuan kota untuk mengatasi ketidakseimbangan ini dan mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.

E. Pembangunan/ Penyediaan Lahan Pemakaman

1. Pemerintah Kota Yogyakarta sudah saatnya membeli dan menyediakan lahan Tempat Pemakaman Umum/TPU karena terbatasnya lahan yang ada dan harga yang selangit, sangat memberatkan Masyarakat Miskin Kota Yogyakarta.
2. Tidak ada peraturan yang mengharuskan lahan/makam harus di Wilayah Kota Yogyakarta, dengan pola kerjasama

antar daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta dapat membeli dan membangun Tempat Pemakaman Umum di Luar wilayah Kota Yogyakarta (konsep kerjasama antar daerah seperti pada kasus TPST Piyungan di Bantul)

3. Dengan besaran anggaran yang disetujui tentu lahan di luar Kota Yogyakarta akan mendapatkan lahan yang lebih luas, sehingga kemampuan menampung jadi lebih besar.
4. Lahan pemakaman yang sudah tertutup/tidak aktif lagi makam baru di Wilayah Kota Yogyakarta bisa difungsikan sebagai RTLH untuk menghindari terjadinya kawasan kumuh dan pemukiman liar,

F. Pendapatan Daerah

1. Kebijakan PAD diupayakan agar tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah melalui E-Tax
2. Perlunya meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, dan kecepatan pelayanan.
3. Memberikan keringanan Pajak kepada Masyarakat dan dunia Usaha agar dapat memacu pergerakan Ekonomi.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional Pengantar Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kami berharap klarifikasi dan pertanyaan yang kami ajukan akan mendapat respon yang memadai dari eksekutif dan semoga dapat lebih menyempurnakan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

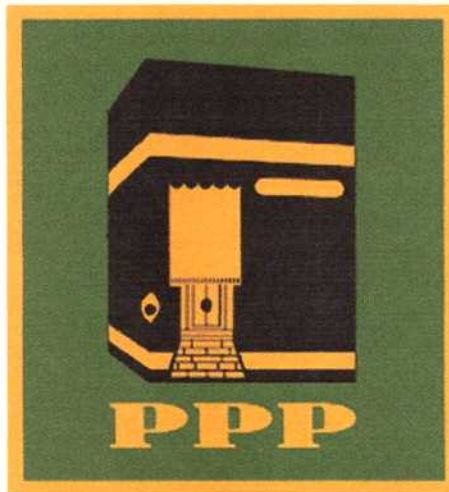
**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

Mohammad Sofyan, S.T

KETUA

Indaruwanto Eko Cahyono

SEKRETARIS



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

TERHADAP

**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRDKOTA YOGYAKARTA**

24 JUNI 2025

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

**TERHADAP
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Disampaikan Pada Rapat Paripurna

DPRD Kota Yogyakarta

Hari /Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025

Jam : 13.00 WIB

Juru Bicara : TOUFIQ SETIAWAN, S.Sn.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam Sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat,

Bapak Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;

Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan , Pimpinan Dewan dan Segenap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta yang kami hormati.

Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan para Kepala SKPD/ OPD Kota Yogyakarta.

Tamu Undangan dan Rekan rekan Wartawan yang berbahagia.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat.

Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

Sidang Paripurna yang kami hormati

Proses penyusunan dan pembahasan perubahan APBD adalah refleksi dari dinamika tata kelola pemerintahan yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan situasi di lapangan, baik itu perubahan kondisi ekonomi

makro, kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi, maupun kebutuhan riil masyarakat yang terus berkembang.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota Yogyakarta beserta seluruh jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta, yang telah bekerja keras dan menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menyusun Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini.

Kami memahami bahwa proses ini melibatkan analisis yang mendalam, perhitungan yang cermat, serta pertimbangan yang komprehensif demi keberlanjutan roda pembangunan dan efektivitas pelayanan di Kota kita tercinta.

Sebagai bagian dari lembaga legislatif, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) memandang bahwa dokumen perubahan APBD ini bukan sekadar angka-angka semata, melainkan merupakan instrumen fiskal strategis yang akan sangat menentukan arah pembangunan, efisiensi alokasi sumber daya, dan kualitas pelayanan yang diterima oleh seluruh warga Kota Yogyakarta.

Oleh karena itu, kami menyambut baik kesempatan ini untuk memberikan pandangan dan masukan konstruktif, sebagai bentuk fungsi pengawasan dan representasi aspirasi masyarakat.

Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang diusulkan benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan pembangunan, serta tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil kajian kami terhadap dokumen yang telah disampaikan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) memiliki

beberapa catatan dan pandangan umum yang kami anggap penting untuk menjadi perhatian bersama dalam pembahasan selanjutnya.

A. Dinamika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Secara Menyeluruh;

Rasionalisasi Belanja dan Dampaknya:

- 1) Kami mencatat bahwa dari sisi pengeluaran daerah, APBD sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp 2.180.516.463.311,00,-(*dua triliun seratus delapan puluh miliar lima ratus enam belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah*) yang kemudian mengalami penurunan menjadi Rp 2.149.780.904.103,01,-(*dua triliun seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat ribu seratus tiga rupiah satu sen*)
- 2) Secara keseluruhan, total APBD sebelum perubahan yang sebesar Rp 2.224.559.795.311,00,-(*dua triliun dua ratus dua puluh empat miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah*) mengalami penurunan sebesar Rp 30.735.559.207,99,-(*tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh rupiah Sembilan puluh sembilan sen*) sehingga pada Perubahan APBD TA 2025 total APBD menjadi sebesar Rp 2.193.824.236.103,01,-(*dua triliun serratus Sembilan puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga rupiah satu sen*)
- 3) Pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP): Penurunan belanja daerah ini, meskipun nominalnya tidak terlalu besar, tetap perlu dicermati secara seksama.

Kami memohon penjelasan lebih detail mengenai pos-pos belanja mana saja yang mengalami efisiensi dan rasionalisasi terbesar.

Apakah penurunan ini disebabkan oleh adanya penundaan proyek, pembatalan kegiatan, ataukah murni dari efisiensi yang tidak mengurangi kualitas program?

Bagaimana Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan bahwa rasionalisasi ini tidak akan berdampak negatif terhadap program-program prioritas pembangunan, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan jaring pengaman sosial?

Mohon diberikan rincian program/kegiatan yang terdampak dan bagaimana mitigasi dampak negatifnya.

B. Target Pendapatan dan Pembiayaan Daerah:

Ancaman dan Peluang dalam Pendapatan Daerah:

- 1) Dari sisi penerimaan daerah, APBD bersumber dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mencatat adanya penurunan yang cukup signifikan pada target pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu sebesar Rp 108.539.633.870,- (*seratus delapan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*)
- 2) Secara spesifik, pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan mengalami penurunan sebesar Rp 62.530.797.495,- (*enam puluh dua miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*).

Demikian pula pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi juga ditargetkan mengalami penurunan sebesar

Rp. 46.008.836.375,-(*empat puluh enam miliar delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*).

- 3) Pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP): Penurunan target pendapatan, khususnya PAD, merupakan indikator yang perlu diwaspadai.

Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab utama penurunan ini, apakah karena proyeksi ekonomi yang tidak tercapai, adanya relaksasi kebijakan, atau penurunan kinerja sektor-sektor tertentu? Strategi konkret apa yang akan dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menggenjot kembali penerimaan PAD di sisa tahun anggaran, mengingat PAD merupakan tulang punggung kemandirian fiskal daerah?

Apakah ada potensi sumber-sumber pendapatan baru yang dapat dieksplorasi?

Bagaimana proyeksi dan upaya Pemerintah Kota dalam memastikan efektivitas penagihan retribusi dan pajak daerah, mengingat potensi kebocoran atau kurang optimalnya penerimaan?

C. Alokasi Anggaran Penyertaan Modal Daerah.

Peningkatan Kinerja BUMD dan Akuntabilitas Investasi:

- 1) Kami menyambut baik komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk terus memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan anggaran penyertaan modal daerah sebesar Rp 44.043.332.000,-(*empat puluh empat miliar empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) kepada BUMD.

- 2) Pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP): Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan penyertaan modal ini. Kami meminta agar Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan bahwa alokasi ini benar-benar digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu penguatan BUMD, peningkatan daya saing, serta pada akhirnya memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas layanan publik dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Apakah telah ada feasibility study yang komprehensif untuk setiap BUMD yang menerima penyertaan modal?

Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja BUMD pasca-penyertaan modal ini?

Apakah ada target-target kinerja spesifik yang harus dicapai oleh BUMD, dan bagaimana dampak investasi ini terhadap dividen yang akan disumbangkan kembali ke kas daerah?

D. Landasan Hukum dan Filosofi Perubahan APBD:

Prinsip Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik:

- 1) Kami memahami bahwa Rancangan Perubahan APBD TA 2025 ini disusun berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati dan ditandatangani pada 19 Juni 2025.

Perubahan anggaran ini juga dilandasi oleh 5 (lima) alasan yang diperbolehkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, termasuk keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa.

2) Pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP): Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mendukung semangat adaptasi dan responsivitas Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap dinamika keuangan daerah yang mungkin berubah sepanjang tahun anggaran.

Namun demikian, kami meminta agar setiap perubahan yang dilakukan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip good governance, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Kami mohon penjelasan lebih lanjut mengenai alasan utama dari 5 (lima) kondisi yang paling dominan melandasi perubahan APBD kali ini.

Bagaimana Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan bahwa perubahan ini tidak hanya bersifat reaktif, namun juga proaktif dalam mengantisipasi tantangan ke depan dan tetap sejalan dengan visi misi pembangunan Kota Yogyakarta?

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, Bapak Walikota beserta jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta,

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menyadari bahwa pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini merupakan proses yang kompleks dan memerlukan waktu serta perhatian khusus dari seluruh pihak. Kami percaya bahwa dengan komitmen dan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif, pelaksanaan pembahasan dalam rangka proses penetapan menjadi Peraturan Daerah ini dapat terselenggara dengan lancar, sesuai harapan kita bersama, serta selesai tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam menyampaikan pandangan umum ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam mengabdikan dan berkarya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta.

Terima kasih

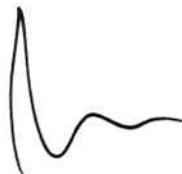
Wabillahitaufiq Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 24 Juni 2025

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

Ketua



H. SETYAJI HERMAWAN



Sekretaris



TAUFIQ SETIAWAN, S.Sn.

**TANGGAPAN FRAKSI PARTAI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP
PENGANTAR NOTA KEUANGAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**TENTANG
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KOTA YOGYAKARTA**



**Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
24 Juni 2025**

**TANGGAPAN FRAKSI PARTAI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP
PENGANTAR NOTA KEUANGAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**TENTANG
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KOTA YOGYAKARTA**

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yth. Sdr. Wali Kota beserta dengan seluruh jajaran eksekutif.

**Yth. Pimpinan beserta anggota DPRD Kota Yogyakarta dan
Sekretaris Dewan beserta jajarannya**

**Yth.Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota
Yogyakarta.**

**Yth. Rekan-Rekan Wartawan dan Undangan serta hadirin yang
berbahagia.**

Salam Restorasi Indonesia.

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem. Terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara Wali Kota yang telah menyampaikan pendapat terhadap Raperda tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Kota Yogyakarta yang telah disampaikan kemarin siang.

Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (**APBD**) dapat diartikan sebagai suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan macam-macam pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 mengartikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Daerah. Tujuan disusunnya APBD adalah sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah.

APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 tentunya sudah ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kita ketahui bersama bahwa pengoptimalan APBD Tahun Anggaran 2025 difokuskan pada pencapaian visi pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu “Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban” untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang terus bertumbuh dan berkembang. Oleh karena ada upaya penyesuaian program kerja Pemkot agar bisa menyesuaikan target yang belum tercapai, maka dibutuhkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Menanggapi Pengantar Nota Keuangan Wali Kota Yogyakarta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan pada 23 Juni 2025. Setelah mencermati dan menganalisis lebih detail, maka Fraksi NasDem DPRD Kota Yogyakarta akan menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:

1. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa perubahan APBD dapat dilakukan karena beberapa hal, seperti keadaan yang menyebabkan harus ada pergeseran anggaran antar organisasi agar bisa menyesuaikan fokus pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2025. Oleh karena itu, Kami dari Fraksi NasDem mendukung Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kota Yogyakarta yang didasarkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah disepakati dan ditandatangani pada 19 Juni 2025.
2. APBD Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan mengalami penurunan sebanyak Rp. 30.735.559.207,99,- (tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh rupiah sembilan puluh sembilan sen) atau 1,38% dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum perubahan. Kami Fraksi Partai NasDem kami berharap dalam realisasinya nanti dapat tercapai sehingga tidak ada pengurangan dari yang telah direncanakan sebelumnya, meskipun situasi perekonomian secara Nasional melemah dan banyaknya penyesuaian anggaran kebijakan pemerintah pusat.

3. Pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebanyak Rp. 108.539.633.870 (seratus delapan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) atau 5,16 % dari pendapatan daerah sebelum perubahan. Kami memberikan catatan agar realisasi tidak ada penurunan, justru kenaikan karena pola selama ini capaian selalu di atas target yang telah ditentukan. Kami sangat mengapresiasi hal ini jika harapan tersebut bisa direalisasikan ke depannya.
4. Adanya penurunan PAD pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi catatan kami agar ke depan bisa ditingkatkan lagi. Pemkot harus terus bekerja secara maksimal agar PAD kota Yogyakarta terus bisa ditingkatkan. Oleh karena, kami Fraksi Partai NasDem mengusulkan beberapa rekomendasi agar PAD kota Yogyakarta terus bisa ditingkatkan dengan melakukan langkah strategis sebagai berikut:
 - a. Adanya upaya maksimalisasi integrasi pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah.
 - b. Meningkatkan pengawasan izin pembangunan gedung perhotelan dan usaha lainnya.
 - c. Mengoptimalkan pengelolaan aset-aset daerah yang belum difungsikan secara maksimal, bisa melalui kerjasama dengan pihak ke-3 dengan meningkatkan kemudahan pelayanan izin usaha dan para investor.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

5. Adanya penurunan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar 30.735.559.207,99,- (tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh rupiah sembilan puluh sembilan sen) atau mengalami penurunan 1,41% dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum perubahan. Meskipun hal yang wajar, belanja daerah mengalami penurunan karena menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat yaitu efisiensi anggaran. Namun, Kami Fraksi NasDem memberikan catatan, kebijakan ini dilakukan dengan tetap memprioritaskan belanja daerah yang bertujuan meningkatkan dan menggerakkan perekonomian masyarakat sehingga bisa membuka banyak peluang kerja dan usaha.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

6. Terkait penyertaan modal daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 44.043.332.000,- (empat puluh empat miliar empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua rupiah). Kami dari Fraksi NasDem memberikan catatan bahwa penyertaan modal daerah bisa ditingkatkan lagi ke depannya, paling tidak melebihi dari tahun-tahun sebelumnya, dan pemberiannya dapat diterima pada awal tahun anggaran sehingga dapat memberikan dividen yang maksimal. Selanjutnya perlu ada penyesuaian tambahan modal untuk periode selanjutnya agar dividen yang saat ini tiga puluh miliar, tahun mendatang bisa mencapai tiga puluh lima miliar sehingga untuk mencapai PAD satu triliun bisa diwujudkan.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.


Demikian Tanggapan Fraksi ini kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam menjalankan tugas, sehingga kita tetap berada di jalan Nya. Ada kurang dan lebihnya dalam kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi, kami Fraksi Partai NasDem dengan segala kerendahan hati mohon maaf yang sebesar – besarnya.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Restorasi Indonesia.**

Kota Yogyakarta, 24 Juni 2025

**Fraksi Partai NasDem
DPRD Kota Yogyakarta**

Ketua



Sigit Wicaksono, S. Kom



Sekretaris



Oleg Yohan



2025

RISALAH RAPAT PARIPURNA

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta**

